

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan *review* dari 30 responden yang merupakan praktisi dan akademisi teknik sipil (Pemerintah DPU, Konsultan, Pengembang, Kontraktor), maka diperoleh *rating* keseluruhan infrastruktur yang diteliti di Provinsi Maluku adalah 62,442 % dan untuk nilai akhirnya memperoleh nilai D". Berikut ini disimpulkan hasil dari analisis tiap infrastruktur yang ada di Provinsi Kalimantan Utara:

1. Pelabuhan udara di Provinsi Kalimantan Utara memiliki *rating* 82,353 % dengan memiliki nilai "B". Infrastruktur peabuhan udara sudah bisa dibilang baik, hanya saja di beberapa kota/kabupaten perlu perbaikan dan perluasan gedung seperti perluasan pada taxi way, area parker, kapasitas ruangan dan fasilitas bangunan lainnya guna menunjang kelancaran kegiatan penerbangan.
2. Pelabuhan laut di Provinsi Kalimantan Utara memiliki *rating* 76,471 % dengan nilai "C". Hasil analisis menunjukkan bahwa pelabuhan laut dan pelabuhan udara memiliki *rating* yang tinggi.
3. Jembatan dan Jalan (Jalan Provinsi) di Provinsi Kalimantan Utara memiliki *rating* 37,059 % dengan nilai "E". Dari data yang di dapat bahwa terjadi peningkatan panjang jalan dari tahun 2009 sampai 2013. Tetapi masih diperlukan adanya pengembangan seperti pemasangan marka jalan dan pemasangan rambu lalu lintas di daerah kecamatan.

4. Jembatan dan Jalan (Kota dan Kabupaten) di Provinsi Kalimantan Utara memiliki *rating* 52,941 % dengan nilai “D”. Dari data yang di dapat bahwa terjadi peningkatan jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2013 sampai 2014.
5. Dam dan Irigasi di Provinsi Kalimantan Utara memiliki *rating* 58,823 % dengan nilai “D”. Kota Tarakan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan merupakan wilayah yang memiliki irigasi yang cukup memadai sedangkan wilayah-wilayah yang lain sedang dalam proses pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.
6. Air Minum di Provinsi Kalimantan Utara memiliki *rating* 64,706 % dengan nilai “D”. Berbagai upaya bertahap telah dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, pemanfaatan air baku telah dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kebijakan pengembangan air baku dan pendayagunaan air tanah melalui pembangunan sarana dan prasarana air baku, sumur dangkal dan embung.
7. Buangan Sampah di Provinsi Kalimantan Utara memiliki *rating* 65,294 % dengan nilai “D”. Diperlukan perubahan mendasar dimulai dari manajemennya dan pertimbangan – pertimbangan yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan infrastruktur buangan sampah yang dapat berdampak buruk pada lingkungan sekitar
8. Energi di Provinsi Kalimantan Utara memperoleh nilai “D” dengan *rating* 55,882 %. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pemadaman listrik bergilir. Pemadaman listrik bergilir tersebut dikarenakan potensi energi yang belum

dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga operasionalisasi ketenagalistrikan masih sangat tergantung tenaga mesin diesel dengan bahan bakar minyak solar sebagai energi primernya.

9. Sekolah / Universitas di Provinsi Kalimantan Utara mendapat nilai “C” dengan *rating* 76,471 %. Kurangnya partisipasi anak mulai jenjang SMA dan perguruan tinggi bukan hanya disebabkan karena kurangnya gedung sekolah yang belum memenuhi syarat namun juga karena perekonomian yang belum dapat dijangkau oleh setiap anak – anak sehingga mereka putus sekolah. Oleh karena itu perlunya peningkatan infrastruktur di sektor pendidikan seperti perkembangan fasilitas – fasilitas yang mampu memenuhi standar yang lebih bagus dari sebelumnya, penambahan gedung sekolah dan ruang kelas yang diharapkan agar semua anak – anak boleh merasakan pendidikan sampai pada jenjang perguruan tinggi meskipun perekonomian yang minim.
10. Telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Utara memperoleh nilai “C” dengan *rating* 68,824 %. Pada kenyataannya hingga saat ini hanya sebagian kecil masyarakat di Kalimantan Utara yang mampu mengakses informasi. Kondisi ini diantaranya disebabkan oleh kurangnya infrastruktur telekomunikasi. Berbagai layanan telekomunikasi dan informasi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa adanya infrastruktur yang memadai. Jadi diperlukan peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan penambahan kapasitas.
11. Obyek / Fasilitas Pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara memperoleh nilai “D” dengan *rating* 60,588 %. Banyak sekali tempat wisata di Provinsi Kalimantan Utara namun kurangnya perhatian dari pemerintah untuk

mengembangkan infrastruktur seperti akses jalan, fasilitas – fasilitas yang memadai (tempat persewaan, wc umum dan kamar mandi yg bersih), kebersihan pantai, administrasi yang baik dan lain – lain.

12. Infrastruktur buangan air kotor di Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan nilai “D” dengan *rating* 60,588%. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat pedalaman tentang pentingnya tempat buangan air kotor, oleh sebab itu peran pemerintah dibutuhkan dalam mensosialisasikan tentang pentingnya buangan air kotor.

13. Buangan Limbah Industri di Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan nilai “D” dengan *rating* 53,529 %. Limbah industri yang mencemari perairan sangat berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup di laut. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketegasan dan kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan izin kepada industri yang ada supaya limbah industri tidak mencemari lingkungan.

5.2 Saran

Dari hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, ada beberapa saran yang harus diperhatikan oleh peneliti kepada pembaca. Harapannya, masukan yang diberikan dapat dipertimbangkan untuk kedepannya, yakni sebagai berikut:

1. Agar penelitian lebih akurat, hendaknya peneliti selanjutnya dapat menambah perspektif – perspektif yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat menjadikan Laporan Tugas Akhir ini sebagai salah satu acuan untuk mengontrol keadaan dan kelayakan infrastruktur serta mengembangkan infrastrukturnya
3. Saran bagi responden dalam menjawab pertanyaan adalah diharapkan bisa lebih jujur dalam memberikan informasi untuk penelitian – penelitian dalam dunia konstruksi agar data yang didapat lebih akurat dan dapat digunakan untuk perkembangan dunia konstruksi.